



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
S.D. TRIWULAN II TAHUN 2022**

NOMOR : LPP-521/PW22.6/2022

TANGGAL : 11 JULI 2022



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jalan Kapten Tantular, Denpasar 80235
Telepon: (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771
E-mail: bali@bpkp.go.id

Nomor : LPP-521/PW22.6/2022
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Triwulan II Tahun 2022

11 Juli 2022

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali
di Denpasar

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian Outcome Triwulan II Tahun 2022

Hasil pengukuran kinerja BPKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Outcome Triwulan II Tahun 2022

No.	Sasprog/Saskeg/IKK	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			2022	Trw II	Trw II	2022	s.d. Trw II
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah						
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (juta)	610,00	-	-	-	NA
1.2	Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (juta)	3.237,35		2.863,96	88,47	NA
1.3	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (juta)	203.793,00	50.000	3.262,60	1,60	6,53
1.4	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (juta)	49.715,64	20.000	94,16	0,19	0,47
	Jumlah/Capaian Rata-Rata		57.354,99		6.221,72	22,56	
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional						
2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	-	-	-	NA
	Capaian Rata-Rata					-	
III	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha						
3.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	-	9	100	NA
3.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	-	1	100	NA
3.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	27	-			NA
	Capaian Rata-Rata					66,67	

No.	Sasprog/Saskeg/IKK	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			2022	Trw II	Trw II	2022	s.d. Trw II
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	-	100	100	NA
4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80	-	-	-	NA
4.3	Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1		-	-	NA
	Capaian Rata-Rata					33,33	
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU						
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1	1	1	100,00	100,00
5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	8	5	5	62,50	100,00
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	1	1	100,00	100,00
5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	9	9	9	100,00	100,00
5.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	1	1	1	100,00	100,00
5.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	3	-		-	NA
5.7	Persentase desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	100	-	100,00	100,00	NA
5.8	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	3	-	9	300,00	NA
5.9	Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	90	30	30,00	33,33	100,00
5.10	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	61	-	10	16,39	NA
5.11	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	3	-	-	-	NA
	Capaian Rata-Rata					82,93	
VI	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan						
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	86	-	-	-	NA
6.2	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95	-	-	-	NA
6.3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100	-	-	-	NA
6.4	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80	-	-	-	NA
6.5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	81	-	-	-	NA
6.6	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	Persen	100	40	44,44	44,44	111,11
6.7	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	65	-	-	-	NA
6.8	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	76	-	-	-	NA
	Capaian Rata-Rata					5,56	

Tabel 1 disajikan kembali pada Lampiran 1.

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebagaimana pada tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut.

1 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja, yaitu

1. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi;
2. Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi;
3. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah; dan
4. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dari empat IKK diatas terdapat tiga IKK yang terealisasi kinerjanya, yakni sebagai berikut:

1. 2. Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi

IKK “Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi” untuk menilai sejauh mana potensi penerimaan negara/daerah yang dapat dioptimalisasi melalui kegiatan pengawasan BPKP. Potensi penerimaan negara/daerah yang diidentifikasi dapat menambah target penerimaan negara/daerah yang ditetapkan K/L/D berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP.

Potensi Penerimaan negara/daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBN/D, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya untuk potensi penerimaan negara adalah pajak, bea dan cukai, PNPB serta sumber penerimaan lainnya. Sedangkan untuk potensi penerimaan daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah.

Target nilai potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi pada tahun 2022 sebesar Rp3.237.350.000,00. Tidak terdapat target kinerja pada triwulan II.

Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.863.958.841,00 atau 88,47% dari target Tahun 2022. Realisasi tersebut merupakan hasil pengawasan atas optimalisasi pendapatan asli daerah pada Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli Tahun 2022. Rincian potensi pajak yang dioptimalisasi sebagai berikut:

NO	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	NILAI POTENSI (Rp)
1	Pajak Hotel	369.159.124,00
2	Pajak Restoran	116.174.501,00
3	Pajak Hiburan	31.839.216,00
4	Pajak Air Tanah	673.886.600,00
5	Retribusi Kebersihan	1.672.899.400,00
TOTAL		2.863.958.841,00

1. 3. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

IKK “Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah” menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan kegiatan pengawasan BPKP. Menilai efisiensi dan kesesuaian belanja dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku yakni:

- 1) Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan:
 - dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat;

- rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat; dan
 - ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil.
- 2) Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving*, dan sebagainya.

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah yang ditarget pada tahun 2022 adalah sebesar Rp203.792.640.000,00. Target kinerja pada triwulan II sebesar Rp50.000.000.000,00.

Per Triwulan II tahun 2022, terealisasi sebesar Rp3.262.601.440,00 atau 1,60% dari target tahun 2022. Jumlah tersebut merupakan potensi inefisiensi anggaran dan potensi anggaran tidak efektif dari hasil pengawasan evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar.

1. 4. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

IKK “Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah” menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara.

IKK ini diukur dengan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan, misalnya melalui kegiatan audit investigatif, audit PKKN, dan audit lainnya.

Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah Rp49.715.000.000,00. Target sampai dengan Triwulan II sebesar Rp20.000.000.000,00.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, terdapat realisasi sebesar Rp94.159.064,00 atau 0,19% dari target tahun 2022.

Rincian realisasi temuan atas kegiatan pengawasan sebagai berikut:

No	Pengawasan	Nilai Penyelamatan (Rp)
1	Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Dam Operational Improvement and Safety Project Phase II DOISP II Loan IBRD No. 8711 ID dan Loan AIIB No. 000010-1-IDN pada Project Implementation Unit PIU Balai Wilayah Sungai BWS Bali-Penida untuk Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2021	24.245.065,00
2	Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project WSLIC-3Pamsimas III Loan ID 8578 Tahun Anggaran 2021 pada:	
	a. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Bali	7.035.000,00
	b. Kabupaten Bangli	6.780.000,00
	c. Kabupaten Gianyar	32.899.000,00
3	Laporan Hasil Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU National Slum Upgrading Project NSUP IBRD Loan Number 8636 ID AIIB LN 0004-IDN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Uji Petik Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2021	23.200.000,00
TOTAL		94.159.065,00

2

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan”.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, tidak terdapat target atas IKK ini maupun realisasi kinerjanya.

3

Sasaran Kegiatan 3: *Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha*

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat;
2. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat; dan
3. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dari ketiga indikator kinerja tersebut terdapat dua IKK yang terealisasi kinerjanya, yang diuraikan sebagai berikut:

3.1. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

IKK “Jumlah BUMD dengan kinerja sehat” menunjukkan jumlah BUMD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun *assessor* lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendukung IKK ini antara lain melakukan audit/evaluasi kinerja pada BUMD dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi AOI yang diberikan. IKK ini diukur dengan menjumlahkan BUMD dengan kinerja minimal “Sehat” pada tahun berjalan.

Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah sembilan BUMD dengan kinerja minimal “sehat”, namun tidak terdapat target pada triwulan II.

Per Triwulan II tahun 2022, terdapat sembilan BUMD dengan kinerja baik/sehat atau 100% target tahun 2022. Sembilan BUMD tersebut yaitu:

- 1) Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung;
- 2) Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli;
- 3) Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten Buleleng;
- 4) Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana;
- 5) Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar;
- 6) Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem;
- 7) Perumda Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung;
- 8) Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan; dan
- 9) Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar.

3.2. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

IKK “Jumlah BLUD dengan kinerja sehat” menunjukkan banyaknya BLUD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun *assessor* lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”. Kegiatan pengawasan untuk mendukung IKK ini yakni melakukan audit kinerja pada BLUD dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi AOI yang diberikan. IKK ini diukur dengan menjumlahkan BLUD dengan kinerja minimal “Sehat” pada tahun berjalan.

Target kinerja pada tahun 2022 sebanyak 1 BLUD dengan kinerja sehat. Tidak terdapat target pada triwulan II. Per Triwulan II tahun 2022, terdapat satu BLUD yakni Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung dengan kinerja baik atau 100% dari target target tahun 2022.

4

Sasaran Kegiatan 4: *Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi*

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti;
2. Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti;
3. Jumlah Pemda menindaklanjuti *Area Of Improvement* dari hasil pengukuran EPK

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dari ketiga indikator kinerja tersebut terdapat satu IKK yang terealisasi kerjanya, yang diuraikan sebagai berikut:

4.1.Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Pengawasan BPKP bidang investigasi yang berorientasi represif dalam konteks pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli, dan audit dengan tujuan tertentu lainnya bidang investigasi.

Yang dimaksud K/L/P/BU menindaklanjuti hasil pengawasan represif dalam indikator ini adalah K/L/P/BU dan atau instansi penegak hukum yang meminta penugasan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagaimana tertuang di dalam laporan hasil audit.

Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari APH, tindak lanjut dimaksud adalah digunakannya laporan hasil audit sebagai bukti surat dalam berkas penyidikan/penuntutan. Dalam hal penerimaan penugasan bersumber dari K/L/P/BU, tindak lanjut dimaksud adalah tindakan korektif dan/atau tindak lanjut hukum sebagaimana dinyatakan dalam rekomendasi. Indikator Kinerja tersebut diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah KLPBU/ APH yang menindaklanjuti rekomendasi}}{\text{Jumlah penugasan pengawasan represif}} \times 100\%$$

Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah 100%, tidak terdapat target sampai dengan Triwulan II.

Per Triwulan II tahun 2022, terdapat enam laporan perhitungan kerugian keuangan negara dan dilanjutkan dengan pemberian keterangan ahli telah ditindaklanjuti mitra kerja dengan realisasi 100% atau 100% dari target tahun 2022, yaitu:

- 1) Dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar dalam Kegiatan Belanja Aci-Aci dan Sesajen untuk Desa Adat, Subak dan Banjar Adat di Wilayah Kelurahan Kota Denpasar pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 dan 2020
- 2) Dugaan tindak pidana korupsi pada LPD Desa Pakraman Belusung, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar tahun 2018 s.d. 2020

- 3) Dugaan Penyalahgunaan Dana LPD Desa Pekraman Sunantaya Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sejak Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2017
- 4) Dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Masyarakat dan Dana Pemerintah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Kota Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018
- 5) Dugaan tindak pidana korupsi pada BPD Bali Cabang Badung di Kuta Tahun 2016
- 6) Dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Trenggana Denpasar periode 2016 s/d 2018.

5

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU” ditunjukkan oleh pencapaian sebelas indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3;
2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3;
3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3;
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3;
5. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3;
6. Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3;
7. Persentase desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
8. Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes;
9. Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah;
10. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai; dan
11. Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dari sebelas IKK terdapat lima IKK yang telah ditetapkan target kerjanya, yang diuraikan sebagai berikut:

5.1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” mencerminkan kualitas kapasitas dan kapabilitas APIP pemerintah provinsi dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern pada pemerintah provinsi.

Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah satu APIP berada pada level 3, sedangkan target sampai dengan Triwulan II adalah satu APIP. Per Triwulan II tahun 2022, target satu APIP atau 100% dari target Triwulan II ini sudah terpenuhi.

5.2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” mencerminkan kualitas kapasitas dan kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern pada pemerintah daerahnya masing-masing.

Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah delapan APIP berada pada level 3, sedangkan target sampai dengan Triwulan II adalah lima APIP. Per Triwulan II tahun 2022, tercapai 5 APIP atau 100% dari target Triwulan ini atau 62,50% dari target tahun 2022. Perwakilan melakukan sosialisasi penilaian mandiri kapabilitas APIP dan bimbingan teknis tindak lanjut renaksi peningkatan kapabilitas APIP level 3 pada Inspektorat Kota Denpasar.

- 5.3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3** IKK “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” mencerminkan jumlah provinsi dengan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. IKK ini diukur dengan menjumlahkan provinsi pada wilayah kerja pengawasan dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3. Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah satu pemda, sama dengan target Triwulan II. Per Triwulan II tahun 2022, terdapat 1 pemda SPIP \geq level 3 atau tercapai 100% dari target tahun 2022.
- 5.4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3** IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” mencerminkan jumlah Kabupaten/Kota dengan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. IKK ini diukur dengan menjumlahkan Kabupaten/Kota pada wilayah kerja pengawasan dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3. Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah sembilan pemda, sama dengan target Triwulan II. Per Triwulan II tahun 2022, terdapat sembilan pemda SPIP \geq level 3 atau tercapai 100% dari target tahun 2022.
- 5.5. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3** IKK “Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3” mencerminkan jumlah Provinsi yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan provinsi yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko. Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah satu provinsi, sama dengan target Triwulan II. Per Triwulan II tahun 2022, terdapat 1 provinsi dengan MRI \geq level 3 atau tercapai 100% dari target tahun 2022.
- 5.7. Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa** IKK “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa” menunjukkan sejauh mana tingkat ketaatan pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan. Rumus pengukuran IKK ini adalah jumlah desa yang telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dibandingkan jumlah desa seluruhnya di wilayah provinsi. Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah 100% desa menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Tidak terdapat target pada triwulan II. Per Triwulan II tahun 2022, realisasi IKK sebesar 100% atau sebanyak 636 desa atau seluruh desa di Provinsi Bali telah menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0 dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangannya. Realisasi tersebut jika dibandingkan target kinerja triwulan ini 100% dari target tahun 2022.
- 5.8. Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes** IKK “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” mengukur sejauh mana APIP telah mampu melakukan pengawasan keuangan desa dengan menggunakan Aplikasi Siswaskeudes. IKK diukur dengan menjumlahkan APIP yang telah mengimplementasikan Siswaskeudes. Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah 3 APIP. Tidak terdapat target pada triwulan II. Per Triwulan II tahun 2022 sebanyak 9 APIP yakni seluruh APIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali telah mengimplementasikan Siswaskeudes. Dengan demikian tercapai 300% dari target tahun 2022 sebanyak 9 APIP.

5.9. Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

IKK “Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah” menunjukkan tingkat akuntabel (efisien dan efektif) pemda dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB. Rumus pengukuran IKK ini yaitu jumlah pemda dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB dibandingkan jumlah pemda di wilayah unit kerja. Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah 90% pemda akuntabel, sedangkan target sampai dengan Triwulan II adalah 30% Pemda. Per Triwulan II tahun 2022, realisasi IKK sebanyak tiga pemda memperoleh opini WTP dan predikat SAKIP BB atau 30% dari jumlah pemda se-Bali. Dengan demikian capaian kinerja Triwulan I ini sebesar 100% dari target Triwulan I ini dan 33,33% dari target tahun ini. Sampai dengan Triwulan I ini, data yang tersedia adalah nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 dan data opini LKPD tahun 2020. Pemda yang memperoleh opini WTP dan predikat SAKIP BB yaitu Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung.

5.10. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai

IKK “Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai” mencerminkan sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan. IKK ini diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan.

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.

Target kinerja ini pada tahun 2022 adalah 61 desa dapat menerapkan pengelolaan aset secara memadai. Tidak terdapat target pada triwulan II. Per Triwulan II tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi atas pengelolaan aset desa yang telah dilaksanakan terdapat 10 desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai. Dengan demikian, capaian IKK ini sebesar 16,39% dari target 61 desa.

6

Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan” ditunjukkan oleh pencapaian delapan indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja;
2. Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri);
3. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri);
4. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri);
5. Nilai SAKIP Unit Kerja;
6. Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja);
7. Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja); dan
8. Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan).

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, dari delapan IKK terdapat satu IKK dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

- 6.6. Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)** IKK “Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)” mencerminkan jumlah realisasi Rencana Tindak Pengendalian yang diselesaikan dibandingkan jumlah RTP setahun. Pengukuran IKK dilakukan menggunakan aplikasi Bewise. Target kinerja pada tahun 2022 adalah 100%. Sedangkan target Triwulan II sebesar 40%. Per Triwulan II tahun 2022, realisasi IKK ini adalah 12 RTP telah diselesaikan atau 44,44% dari target 27 RTP tahun 2022.

B. Capaian *Output* Pengawasan Triwulan II Tahun 2022

Realisasi *output* Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali per Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 14 laporan (sintesa hasil pengawasan), yaitu mencapai 38,89% dari target tahun 2022 sebanyak 36 laporan, dengan ringkasan sebagaimana pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Capaian *Output* Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2022

No		Unit Kerja/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi s.d. Tw. II 2022	Capaian (%)
1	FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	2	0	0,00
2	FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	1	0	0,00
3	FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1	0	0,00
4	FAG.U02	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	7	3	42,86
5	FAG.U06	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha	1	0	0,00
6	FAG.U07	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	1	1	100,00
7	UAG.U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	20	10	50,00
8	UAG.U09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	2	0	0,00
9	UAG.U10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	1	0	0,00
		Jumlah	36	14	38,89

Capaian *output* pengawasan sampai dengan Triwulan II disajikan pada Lampiran 2a dan Lampiran 2b.

C. Kendala Pencapaian Target dan Rencana Tindak

Pada Triwulan II Tahun 2022, pencapaian target belum menemui kendala berarti. Rencana tindak untuk mencapai target pada triwulan berikutnya antara lain:

- 1) melakukan sinergi intern antar bidang pengawasan untuk kegiatan yang berkaitan dan mengatur strategi pemenuhan SDM sesuai prioritas batas waktu yang ditetapkan rendah;
- 2) mengoptimalkan fungsi satuan tugas intern perwakilan dalam menyelenggarakan tugasnya, sehingga target sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan tercapai”
- 3) aktif melakukan koordinasi dengan rendal dan mitra kerja sehingga rencana pengawasan dapat dilaksanakan tepat waktu.
- 4) menyusun sintesa hasil pengawasan untuk setiap topik pada periode triwulan yang ditentukan.

D. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, telah terealisasi anggaran sebesar Rp11.029.049.326,00 atau 47,13% dari total anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2022 sebesar Rp23.402.341.000,00, dengan ringkasan sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Keuangan
Perwakilan BPKP Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2022

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tw. II 2022 (Rp)	(%)
Program 01 (Dukungan Manajemen)	20.437.351.000	10.298.919.502	50,39
Program 06 (Pengawasan Intern)	2.964.990.000	730.129.824	24,63
Jumlah	23.402.341.000	11.029.049.326	47,13

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator Pengawasan
Bidang P3A, 



Ngatno
NIP 19630306 198503 1 001

**TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN SASARAN PROGAM SASARAN KEGIATAN
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
 S.D. TRIWULAN II TAHUN 2022**

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Program/Kegiatan						Anggaran			SDM		
			Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH) 2022	Realisasi (OH)	%
				2022	Trw II	Trw II	2022	s.d. Trw II		s.d. Trw II			s.d. Trw II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Program Pengawasan Pembangunan														
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	610,00	-	-	-	NA					
		2	Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	3.237,35	-	2.863,96	88,47	NA					
		3	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	203.792,64	50.000	3.262,60	1,60	6,53					
		4	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	49.715,00	20.000	94,16	0,19	0,47					
Jumlah/Capaian Rata-Rata					257.354,99		6.220,72	22,56	2,42					
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	5	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	-	-	-	NA					
Capaian Rata-Rata								0,00						
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	6	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	-	9	100	NA					
		7	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	-	1	100	NA					
		8	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	27	-	-	-	NA					
Capaian Rata-Rata								66,67						
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	9	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	-	100	100	NA					
		10	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80	-	-	-	NA					
		11	Jumlah Pemda menindaklanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1	-	-	-	NA					
Capaian Rata-Rata								33,33						

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Program/Kegiatan						Anggaran			SDM			
			Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH) 2022	Realisasi (OH)	%	
				2022	Trw II		Trw II	2022							s.d. Trw II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	12	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Prov	1	1	1	100,00	100,00						
		13	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kab/Kota	8	5	5	62,50	100,00						
		14	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Prov	1	1	1	100,00	100,00						
		15	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/Kota	9	9	9	100,00	100,00						
		16	Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Prov	1	1	1	100,00	100,00						
		17	Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Kab/Kota	3	-	-	-	NA						
		18	Persentase desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	100	-	100,00	100,00	NA						
		19	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	3	-	9	300,00	NA						
		20	Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	90	30	30,00	33,33	100,00						
		21	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	61	-	10	16,39	NA						
22	Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	3	-	-	-	NA								
Capaian Rata-Rata								82,93		2.964.990.000	730.129.824	24,63	9.449	4.152	43,94
B	Program Dukungan Manajemen														
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	86	-	-	-	NA						
		2	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	95	-	-	-	NA						
		3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100	-	-	-	NA						
		4	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80	-	-	-	NA						
		5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	81	-	-	-	NA						
		6	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	Persen	100	40	44,44	44,44	111,11						
		7	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	65	-	-	-	NA						
		8	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	76	-	-	-	NA						
Capaian Rata-Rata								5,56		20.437.351.000	10.298.919.502	50,39	10.706	3.966	37,04
Total										23.402.341.000	11.029.049.326	47,13	20.155	8.118	40,28

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Target dan Realisasi Output Pengawasan
s.d. Triwulan II Tahun 2022

No.	Kode Komponen	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana			Realisasi s.d. Bulan ini			Capaian (%)	
				Tahun 2022 (RKA)	Topik Pengawasan	s.d. Bulan ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2022	s.d. Bulan ini
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9=8/4x100	10=8/5x100
A. Pengawasan Internal											
1	FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	Laporan	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00
2	FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	Laporan	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00
3	FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Laporan	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00
4	FAG.U02	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	Laporan	7	7	4	3	0	3	42,86	75,00
5	FAG.U06	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Laporan	1	3	1	0	0	0	0,00	0,00
6	FAG.U07	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	Laporan	1	1	1	1	0	1	100,00	100,00
7	UAG.U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	Laporan	20	57	15	10	0	10	50,00	66,67
8	UAG.U09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	Laporan	2	3	0	0	0	0	0,00	0,00
9	UAG.U10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	Laporan	1	2	0	0	0	0	0,00	0,00
Jumlah				36	77	21	14	0	14	38,89	66,67
B. Dukungan Manajemen											
1	EBA.962	Layanan Umum	layanan	1		1	1	0	1	100,00	100,00
2	EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	1		1	1	0	1	100,00	100,00
Jumlah				2		2	2	0	2	100,00	100,00
Total				38		23	16	0	16	42,11	69,57

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Target dan Realisasi Output Pengawasan
s.d. Triwulan II Tahun 2022

No.	Kode Komponen	Topik	PJ Topik	Triwulan Topik	Satuan	Jumlah SHP diinput di SIMAX	Rencana		Realisasi s.d. Bulan ini			Capaian (%)	
							Tahun 2022	s.d. Bulan ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2022	s.d. Bulan ini
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5x100	11=9/6x100		
A.	Pengawasan Internal												
1	UAG.U03	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	D204	2	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
2	UAG.U03	Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	D204	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
3	UAG.U03	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	D204	2	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
4	UAG.U03	Penanganan Covid-19-Vaksinasi	D203	1,2,3,4	SHP	2	1	-	-	-	-	0,00	0,00
5	UAG.U03	Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS	D203	1,2,3,4	SHP	1	1	-	-	-	-	0,00	0,00
6	UAG.U03	Penanganan Covid-19-PBJ (Alat Testing/Tracing, Almatkes, Obat dan Faskes)	D201	1,2,3,4	SHP	2	1	-	-	-	-	0,00	0,00
7	UAG.U03	Penanganan Covid-19-Perubahan Perilaku, Komunikasi Publik dan Satu Data BLC	D202	2	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
8	UAG.U03	Stunting	D204	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
9	UAG.U03	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer	D203	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
10	UAG.U03	Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Rujukan	D203	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
11	UAG.U03	Reformasi Sistem Kesehatan-Kemandirian Industri Farmasi dan Almatkes	D201	2,4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
12	UAG.U03	Reformasi Sistem Kesehatan-Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan	D203	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
13	UAG.U03	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	D203	1	SHP	-	1	1	-	-	-	0,00	0,00
14	UAG.U03	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	D203	2	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
15	UAG.U03	Implementasi Bansos APBD	D302	2	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
16	UAG.U03	Implementasi Bansos APBDesa	D303	2	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
17	UAG.U03	Infrastruktur SPAM	D103	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
18	UAG.U03	Infrastruktur Jaringan Irigasi	D103	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
19	UAG.U03	Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt - Bdg)	D103	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
20	UAG.U03	Pembangunan Bandara	D103	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
21	UAG.U03	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	D103	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
22	FAG.U02	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	D301	1	SHP	-	1	1	-	-	-	0,00	0,00
23	FAG.U02	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	D301	1,2,3,4	SHP	2	1	-	-	-	-	0,00	0,00
24	FAG.U02	Optimalisasi PAD	D301	2	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
25	UAG.U03	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	D302	3	SHP	1	1	-	-	-	-	0,00	0,00
26	FAG.U02	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD)	D302	1,2,3,4	SHP	1	1	-	-	-	-	0,00	0,00
27	FAG.U02	Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa	D303	1	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
28	FAG.U02	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa	D303	1,2,3,4	SHP	2	1	-	-	-	-	0,00	0,00
29	FAG.U02	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	D303	1	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
30	FAG.U06	BUMN	D401	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
31	FAG.U06	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)	D405	2	SHP	-	1	1	-	-	-	0,00	0,00
32	FAG.U06	BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD Pendidikan)	D405	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
33	UAG.U03	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	D104	2,4	SHP	1	1	-	-	-	-	0,00	0,00
34	UAG.U03	Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan subsidi bunga/subsidi margin KUR baik reguler maupun tambahan)	D104	2,4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
35	UAG.U03	Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi bunga/subsidi margin Non KUR)	D104	2,4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
36	UAG.U03	Penempatan Dana	D101	1	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
37	UAG.U03	Kemudahan Perizinan (OSS)	D101	2	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
38	UAG.U03	P3DN Nasional	D104	2,3,4	SHP	1	1	-	-	-	-	0,00	0,00
39	UAG.U03	Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi Covid-19	D104	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
40	UAG.U03	Tata Kelola Subsidi Pupuk	D102	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
41	UAG.U03	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	D102	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
42	UAG.U03	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	D302	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
43	UAG.U03	Reformasi Birokrasi	D205	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
44	UAG.U09	SPIP	D304	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
45	UAG.U09	Kapabilitas APIP	D304	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
46	FAG.U07	Pencegahan Kecurangan	D501	1,2	SHP	2	1	1	1	-	1	100,00	100,00
47	UAG.U03	Deteksi Kecurangan	D502	1,2,3,4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
48	UAG.U03	Respons Kecurangan	D503	1,2,3,4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
49	UAG.U03	Kartu Indonesia Pintar	D204	3	SHP	1	1	-	-	-	-	0,00	0,00
50	UAG.U03	Optimalisasi Program Padat Karya	D103	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
51	UAG.U03	Pengembangan Potensi Desa	D303	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
52	UAG.U03	Optimalisasi Pemanfaatan KPBU	D105	1	SHP	-	1	1	-	-	-	0,00	0,00

No.	Kode Komponen	Topik	PJ Topik	Triwulan Topik	Satuan	Jumlah SHP diinput di SIMAX	Rencana		Realisasi s.d. Bulan ini			Capaian (%)	
							Tahun 2022	s.d. Bulan ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2022	s.d. Bulan ini
1	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10=9/5x100	11=9/6x100
53	UAG.U03	Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022	D205	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
54	UAG.U03	Penanggulangan Bencana	D203	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
55	UAG.U03	Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)	D203	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
56	UAG.U03	Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	D203	1	SHP	-	1	1	-	-	-	0,00	0,00
57	UAG.U03	Bimtek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu	D202	1,4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
58	FAG.005	Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung	PW22	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
59	UAG.U03	Evaluasi pada Perguruan Tinggi	D204	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
60	UAG.U03	Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	D204	3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
61	UAG.U03	Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan	D504	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
62	UAG.U03	Pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah	D504	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
63	UAG.U03	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	D301	2	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
64	UAG.U03	Peningkatan Akuntabilitas Aset Daerah	D301	2	SHP	1	1	1	1	-	1	100,00	100,00
65	UAG.U03	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	D103	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
66	UAG.U03	Pengawasan Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah	D302	1	SHP	-	1	1	-	-	-	0,00	0,00
67	UAG.U03	Audit Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR	D103	2	SHP	-	1	1	-	-	-	0,00	0,00
68	FAG.011	Penerapan JFA pada APIP K/L/D	JF74	2,3	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
69	FAG.012	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan	SU01	1,2,3,4	SHP	1	1	-	-	-	-	0,00	0,00
70	UAG.U03	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	D105	1,2,3,4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
71	UAG.U10	Kualitas Pengendalian Intern	D405	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
72	UAG.U10	Kontribusi atas Pembangunan Nasional	D405	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
73	UAG.U09	Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	D303	1,2,3,4	SHP	1	1	-	-	-	-	0,00	0,00
74	FAG.005	Pengawasan Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	PW22	4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
75	UAG.U03	BLU/BLUD, BUMD, BUMDES	D405	1,2,3,4	SHP	-	1	-	-	-	-	0,00	0,00
76	UAG.U03	P3DN Pemerintah Daerah	D301	2,3,4	SHP	1	1	-	-	-	-		
77	UAG.U03	P3DN Badan Usaha	D402	2,3,4	SHP	1	1	-	-	-	-		
							77	21	14	0	14	18,18	66,67
B.	Dukungan Manajemen												
1	EBA.962	Layanan Umum			layanan		1	0	1	0	1	100,00	0,00
2	EBA.994	Layanan Perkantoran			layanan		1	0	1	0	1	100,00	0,00
							2	0	2	0	2	100,00	0,00
							79	21	16	0	16	20,25	76,19

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama
s.d. Triwulan II Tahun 2022

No.	Sektor APP	Penugasan Pengawasan (PP)							Laporan Hasil Pengawasan							% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP		
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA				
		Tahun 2022	s.d. Bulan Ini		Tahun 2022	s.d. Bulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2022	s.d. Bulan Ini		Tahun 2022	s.d. Bulan Ini	Jumlah Lap Diinput	% Lap yg Diinput dalam SIMA		% Lap yg Diinput terhadap RPL	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=15/11*100	18=12/5*100	
A	PKPT																	
1	PKPT Awal																	
1	Pengentasan Kemiskinan Ekstrim; Reformasi Pembangunan SDM	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	100,00%	100,00%	
2	Reformasi Pembangunan SDM	19	11	10	52,63%	90,91%	10	100,00%	19	8	9	47,37%	112,50%	9	100,00%	112,50%	90,00%	
3	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	6	4	4	66,67%	100,00%	4	100,00%	6	0	4	66,67%	0,00%	4	100,00%	0,00%	100,00%	
4	Pemulihan Ekonomi	9	8	7	77,78%	87,50%	6	85,71%	9	2	6	66,67%	300,00%	5	83,33%	250,00%	85,71%	
5	Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	7	1	1	14,29%	100,00%	1	100,00%	7	1	1	14,29%	100,00%	1	100,00%	100,00%	100,00%	
6	Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	3	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	3	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
7	Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	13	10	10	76,92%	100,00%	10	100,00%	13	6	8	61,54%	133,33%	7	87,50%	116,67%	80,00%	
8	Ketahanan Pangan	3	1	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	3	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
9	Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD)	1	0	1	100,00%	0,00%	1	100,00%	1	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10	Dukungan Pengawasan	4	1	1	25,00%	100,00%	1	100,00%	4	0	1	25,00%	0,00%	1	100,00%	0,00%	100,00%	
11	Non-Prioritas	26	12	13	50,00%	108,33%	13	100,00%	26	5	8	30,77%	160,00%	7	87,50%	140,00%	61,54%	
	Sub Jumlah 1	92	49	48	52,17%	97,96%	47	97,92%	92	23	38	41,30%	165,22%	35	92,11%	152,17%	79,17%	

No.	Sektor APP	Penugasan Pengawasan (PP)							Laporan Hasil Pengawasan							% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP	
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL			Capaian (%)		Input dalam SIMA			
		Tahun 2022	s.d. Bulan Ini		Tahun 2022	s.d. Bulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2022	s.d. Bulan Ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Tahun 2022	s.d. Bulan Ini	Jumlah Lap Diinput	% Lap yg Diinput dalam SIMA		% Lap yg Diinput terhadap RPL
3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=15/11*100	18=12/5*100		
				0							0						
2	PKPT Tambahan (Revisi)																
1	Pengentasan Kemiskinan Ekstrim; Reformasi Pembangunan SDM	4	4	4	100,00%	100,00%	4	100,00%	4	4	4	100,00%	100,00%	4	100,00%	100,00%	100,00%
2	Reformasi Pembangunan SDM	11	10	11	100,00%	110,00%	10	90,91%	11	5	9	81,82%	180,00%	9	100,00%	180,00%	81,82%
3	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	33	33	33	100,00%	100,00%	29	87,88%	33	0	26	78,79%	0,00%	24	92,31%	0,00%	78,79%
4	Pemulihan Ekonomi	7	7	7	100,00%	100,00%	6	85,71%	7	3	0	0,00%	0,00%	6	0,00%	200,00%	0,00%
5	Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	1	1	0	0,00%	0,00%	1	0,00%	100,00%	0,00%
6	Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
7	Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	23	23	23	100,00%	100,00%	22	95,65%	23	12	0	0,00%	0,00%	7	0,00%	58,33%	0,00%
8	Ketahanan Pangan	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
9	Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD)	1	0	1	100,00%	0,00%	1	100,00%	1	0	1	100,00%	0,00%	1	100,00%	0,00%	100,00%
10	Dukungan Pengawasan	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
11	Non-Prioritas	28	7	28	100,00%	400,00%	26	92,86%	28	6	17	60,71%	283,33%	14	82,35%	233,33%	60,71%
	Sub Jumlah 2	108	85	108	100,00%	127,06%	99	91,67%	108	31	57	52,78%	183,87%	66	115,79%	212,90%	52,78%
	Jumlah A (Sub 1+Sub 2)	200	134	156	78,00%	116,42%	146	93,59%	200	54	95	47,50%	175,93%	101	106,32%	187,04%	60,90%
																	0,00%
B	KAP Generik	8	8	8	100,00%	100,00%	8	100,00%	8	0	6	75,00%	0,00%	5	83,33%	0,00%	75,00%
	Sub Jumlah B	8	8	8	100,00%	100,00%	8	100,00%	8	0	6	75,00%	0,00%	5	83,33%	0,00%	75,00%
	Total A+B	208	142	164	78,85%	115,49%	154	93,90%	208	54	101	48,56%	187,04%	106	104,95%	196,30%	61,59%

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Triwulan II Tahun 2022

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)							Laporan Hasil Pengawasan							% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Inputing dalam SIMA		
		Tahun 2022	s.d. Bulan Ini		Tahun 2022	s.d. Bulan Ini	Jumlah ST telah Diinput	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2022	s.d. Bulan Ini		Tahun 2022	s.d. Bulan Ini	Jumlah Lap Diinput dlm SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100
A	PKPT															
1	PKPT Awal															
	IPP	38	15	14	36,84%	93,33%	14	100,00%	38	9	12	31,58%	133,33%	12	100,00%	85,71%
	APD	26	17	19	73,08%	111,76%	18	94,74%	26	9	16	61,54%	177,78%	15	93,75%	84,21%
	AN	18	13	11	61,11%	84,62%	11	100,00%	18	5	6	33,33%	120,00%	4	66,67%	54,55%
	Investigasi	5	2	2	40,00%	100,00%	2	100,00%	5	0	2	40,00%	0,00%	2	100,00%	100,00%
	P3A	5	2	2	40,00%	100,00%	2	100,00%	5	0	2	40,00%	0,00%	2	100,00%	100,00%
	Sub Jumlah 1	92	49	48	52,17%	97,96%	47	97,92%	92	23	38	41,30%	165,22%	35	92,11%	79,17%
2	PKPT Tambahan (Revisi)															
	IPP	37	21	37	100,00%	176,19%	34	91,89%	37	14	25	67,57%	178,57%	22	88,00%	67,57%
	APD	33	26	33	100,00%	126,92%	30	90,91%	33	8	26	78,79%	325,00%	21	80,77%	78,79%
	AN	9	9	9	100,00%	100,00%	9	100,00%	9	9	2	22,22%	22,22%	2	100,00%	22,22%
	Investigasi	27	27	27	100,00%	100,00%	24	88,89%	27	0	21	77,78%	0,00%	19	90,48%	77,78%
	P3A	2	2	2	100,00%	100,00%	2	100,00%	2	0	2	100,00%	0,00%	2	100,00%	100,00%
	Sub Jumlah 2	108	85	108	100,00%	127,06%	99	91,67%	108	31	76	70,37%	245,16%	66	86,84%	70,37%
	Jumlah A	200	134	156	78,00%	116,42%	146	93,59%	200	54	114	57,00%	211,11%	101	88,60%	73,08%
B	KAP Generik															
	IPP	3	3	3	100,00	100,00	3	100,00%	3	0	2	66,67%	0,00%	2	100,00%	66,67%
	APD	1	1	1	100,00	100,00	1	100,00%	1	0	1	100,00%	0,00%	1	100,00%	100,00%
	AN	4	4	4	100,00	100,00	4	100,00%	4	0	3	75,00%	0,00%	2	66,67%	75,00%
	Investigasi	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	P3A	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Sub Jumlah B	8	8	8	100,00	100,00	8	100,00%	8	0	6	75,00%	0,00%	5	83,33%	75,00%
	Total	208	142	164	78,85	115,49	154	93,90%	208	54	120	57,69%	222,22%	106	88,33%	73,17%